



Krisis Ketahanan Pangan Penyebab Ketergantungan Impor Tanaman Pangan di Indonesia

**Tranggono¹, R. Moch. Januar Ibnu Akbar², Valina Zakiah Rahma Putri³,
Nanda Arifah⁴, Omar Galih Wikarsa⁵, Rafish Jadwa Ramadhan⁶**

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur^{1,2,3,4,5,6}

e-mail: ramadhanrafi967@gmail.com

Abstract

The crisis of food availability is a problem that often occurs in Indonesia, especially related to rice imports. This is caused by several factors, such as high population growth, decreased agricultural productivity, and changes in people's consumption patterns. Rice imports are the most feasible solution to meet domestic rice needs, but this has an impact on food dependence and the powerlessness of the national economy. In relation to the food security crisis in Indonesia, many aspects need to be considered. These factors include: rapid population growth, decreased agricultural productivity, changes in people's consumption patterns, and low investment in the agricultural sector. Increasing rice imports is the most feasible solution to meet domestic demand for rice. However, this has led to food dependence and the powerlessness of the national economy. Therefore, it is necessary to make efforts to increase agricultural productivity, reduce dependence on rice imports, and develop the agricultural sector in a sustainable manner. This needs to be supported by various government policies, such as incentives for farmers, development of agricultural technology, and promotion of local rice consumption. These efforts include increasing agricultural productivity, developing environmentally friendly agricultural technology, reducing rice imports, and consuming local rice.

Keywords: Food security, Rice Imports, Food Dependence

Abstrak

Krisis ketersediaan pangan merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia, khususnya terkait dengan impor beras. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi, penurunan produktivitas pertanian, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Impor beras menjadi solusi yang paling memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri, namun hal ini berdampak pada ketergantungan pangan dan ketidakberdayaan ekonomi nasional. Dalam kaitannya dengan krisis ketahanan pangan di Indonesia, banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Peningkatan impor beras menjadi solusi yang paling memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri. Namun, hal ini memunculkan ketergantungan pangan dan ketidakberdayaan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi ketergantungan impor beras, dan mengembangkan sektor pertanian secara berkelanjutan. Hal ini perlu didukung dengan berbagai kebijakan pemerintah, seperti insentif bagi petani, pengembangan teknologi pertanian, dan promosi konsumsi beras lokal. Upaya tersebut meliputi peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, pengurangan impor beras, serta promosi konsumsi beras lokal.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Impor Beras, Ketergantungan Pangan

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia tergolong tinggi. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020–2022 terus meningkat hingga mencapai 275 juta jiwa (BPS, 2022). Sementara lahan untuk ketersediaan pangan bukannya bertambah melainkan semakin berkurang karena berubah menjadi infrastruktur nonpertanian seperti perumahan/pemukiman penduduk. Hal tersebut menyebabkan penurunan produktivitas pertanian dan berimbas pada penurunan ketersediaan bahan pangan. Jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap jumlah ketersediaan dan pemanfaatan pangan.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa)
2020	270 203,9
2021	272 682,5
2022	275 773,8

Sumber: BPS 2022

Beras adalah makanan pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia. Ketika jumlah penduduk semakin meningkat, maka konsumsi beras akan meningkat pula. Tingkat ketergantungan penduduk Indonesia terhadap beras cukup tinggi, yang akan menimbulkan masalah jika terjadi kelangkaan. Masalah-masalah ini dapat membahayakan pasokan makanan negara. Impor beras menjadi salah satu solusi untuk menjaga ketersediaan beras di Indonesia. Impor beras yang dilakukan oleh Indonesia menunjukkan jumlah ketersediaan beras tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan nasional. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan untuk impor beras sebagai berikut: "Bila penyediaan pangan dalam negeri tidak mampu dipenuhi dengan produksi maka dilakukan kebijakan impor pangan sesuai dengan kebutuhan". Akan tetapi, apabila produksi beras surplus dan mampu memenuhi konsumsi beras nasional, namun impor beras masih tetap dilakukan. Maka, tujuan impor beras tersebut digunakan untuk menciptakan *excess supply* sehingga harga beras menjadi stabil (Paipan and Abrar, 2020).

Populasi dunia terus bertambah menyebabkan peningkatan kebutuhan akan makanan. Hal tersebut mengharuskan setiap negara dapat menjaga ketersediaan bahan pangan yang dimilikinya, untuk menghindari ancaman krisis pangan. Kasus krisis pangan dan kelaparan tertinggi terjadi pada tahun 1970-an (Mudrieq, 2014). Menurut *UN Population Fund* (2000) dalam (Mudrieq, 2014)

memprediksi akan terdapat 3,34 miliar jiwa di seluruh dunia yang harus dipenuhi kebutuhan pangannya. Upaya penanganan masalah krisis pangan salah satunya dengan menguatkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah sebuah kondisi yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun kestabilan penduduk dengan kondisi pangan (Partiwi and Sukamdi, 2016). Kondisi ketahanan pangan nasional menjadi tolak ukur kondisi pangan pada suatu negara. Ketika kondisi ketahanan pangan nasional buruk maka suatu negara tersebut sedang mengalami krisis pangan. Saat ini, perekonomian global sedang mengalami Indonesia juga terkena imbas dari hal tersebut. Menurut data Global Food Security Index (2022) ketahanan pangan Indonesia pada 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya berada di level 60,2. Akan tetapi, level ini masih dibawah rata-rata global. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan Indonesia masih perlu diperkuat lagi.

Gambar 1.
Indeks Ketahanan Pangan Indonesia (2012–2022)



Sumber: GFSI 2022

Fenomena terkait kondisi ketahanan pangan sebagai penyebab impor beras yang masih tetap dilakukan oleh pemerintah Indonesia menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh-pengaruh ketahanan pangan sebagai penyebab impor beras yang masih dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metodologi deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif memerlukan penjelasan atau deskripsi rinci tentang suatu situasi dengan kata-kata. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan mencoba mendeskripsikan

dan merangkum berbagai kondisi, situasi, atau beberapa variabel yang berkembang di masyarakat dan menjadi subjek penelitian (Supriyanto, 2022). Penelitian ini menggambarkan kondisi yang ada di Indonesia dengan menganalisa kebijakan impor beras untuk ketahanan pangan Indonesia. Kebijakan impor beras yang berlebihan akan menyebabkan ketergantungan pangan dan ketidakberdayaan ekonomi nasional.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data untuk pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi, khususnya cara memperoleh data dari organisasi dan lembaga pemerintah yang terkait dengan penelitian ini serta literatur yang mendukung penelitian tersebut informasi sekunder yang diperoleh dari organisasi yang terkait yaitu Badan Pusat Statistik, *Global Food Security Index* (GFSI) dan sumber lain yang dapat menunjang penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan ditabulasi serta dianalisis sesuai dengan tujuan mengikuti alur sistematika pembahasan. Studi kepustakaan memperkuat hasil penelitian karena menggunakan referensi pada penelitian sebelumnya untuk dijadikan rujukan dalam penelitian (Supriyanto and Hana, 2020).

PEMBAHASAN

Ketahanan pangan sangat penting, terutama untuk negara berpenduduk padat seperti Indonesia. Populasi Indonesia diperkirakan mencapai 220 juta pada tahun 2020 dan diproyeksikan akan tumbuh menjadi 270 pada tahun 2025. Pengalaman sejarah pembangunan Indonesia menunjukkan bahwa masalah ketahanan pangan terkait erat dengan stabilitas ekonomi (khususnya inflasi, biaya hidup secara keseluruhan) dan kebijakan stabilitas nasional. Oleh karena itu ketahanan pangan merupakan prasyarat mutlak bagi pelaksanaan pembangunan nasional.

Ketahanan pangan, yang didefinisikan oleh FAO sebagai situasi di mana semua rumah tangga memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk semua keluarga dan rumah tangga, telah lama menjadi masalah global. Program ini diciptakan pada awal 1990-an oleh gerakan petani global bernama Via Campesina dengan tujuan mendorong organisasi non-pemerintah (LSM) dan masyarakat sipil untuk berpartisipasi sebagai alternatif kebijakan neoliberal dalam produksi pangan, khususnya liberalisasi global, memperkenalkan konsep perdagangan makanan. Perbedaan antara kedaulatan dan ketahanan pangan adalah dimana dan bagaimana pangan diproduksi. Ketahanan pangan tidak mempedulikan dua hal itu, tetapi kedaulatan pangan sangat memperdulikan hal tersebut.

Kedaulatan pangan merupakan target yang perlu perjuangkan serta memainkan peran penting dalam pertanian serta produksi pangan. Dalam kedaulatan pangan, pangan yang dapat dimakan menjadi proses produksi pangan itu sendiri. Dilokalisasi dan ditentukan oleh lokal, bukan dipaksakan oleh pihak luar

(kapitalis global). Kedaulatan pangan memberi negara kekuatan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan gizi warganya. Banyak negara sekarang berjuang untuk mencapai kedaulatan pangan karena pangan menjadi semakin langka dan sulit untuk memprediksi bagaimana produksi pangan akan merespon perubahan iklim. Aliran negara berdaulat pangan, seperti surplus ekspor pangan yang digunakan untuk membeli mata uang asing, tidak sama dengan gagasan negara berdaulat pangan (Dewi and Ginting, 2012).

Tabel 1
Perbedaan Swasembada Pangan, Kemandirian Pangan, Kedaulatan Pangan, dan Ketahanan Pangan

Indikator	Swasembada Pangan	Kemandirian Pangan	Kedaulatan Pangan	Ketahanan Pangan
Lingkup	Nasional	Nasional	Nasional	Nasional
Sasaran	Komoditas pangan	Komoditas pangan	Komoditas pangan	Komoditas pangan
Strategi	Substitusi impor	Peningkatan daya saing (poromosi ekspor)	Pelanggaran impor	Peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan pangan
Output	Peningkatan produksi pangan (dengan perlindungan pada petani)	Peningkatan produksi pangan yang berdaya saing	Peningkatan produksi pangan (dengan perlindungan pada petani)	Status gizi (penurunan kelaparan, gizi kurang, dan gizi buruk)
Outcome	Ketersediaan pangan oleh produk domestik (tidak impor)	Ketersediaan pangan oleh produk domestik (impor hanya pelengkap)	Kesejahteraan petani	Manusia sehat dan produktif (angka harapan hidup tinggi)

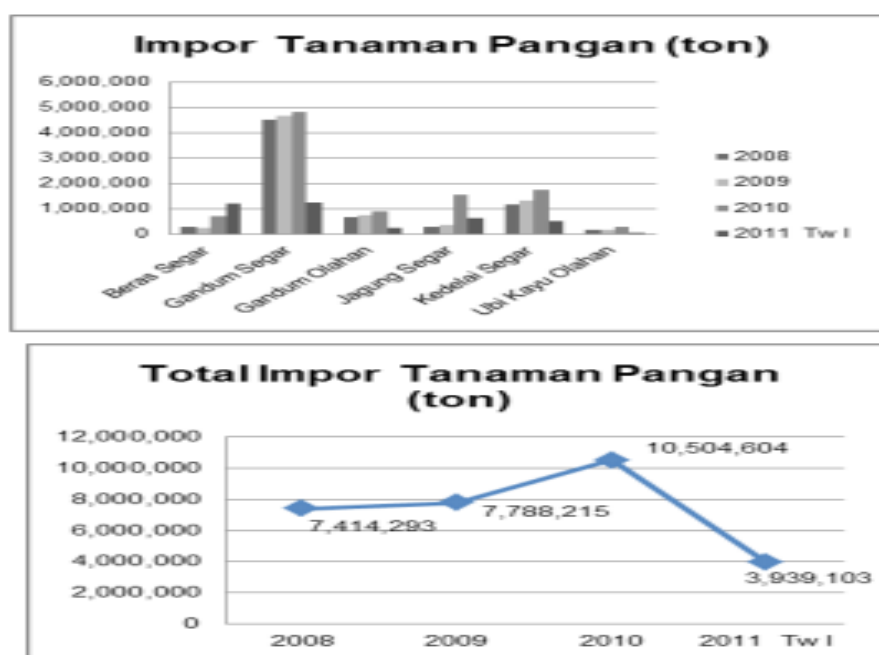
Sumber: AR Hanani 2008

Percepatan pertumbuhan populasi atau pertumbuhan penduduk saat ini menimbulkan tantangan besar bagi upaya memberi makan dunia. Pada tahun 2050, ancaman krisis pangan membayangi dunia. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memperkirakan bahwa pada tahun 2050 akan terjadi kekurangan pangan di seluruh dunia karena populasi dunia diperkirakan akan melebihi 9 miliar. Sama halnya dengan situasi nasional, laju pertumbuhan penduduk di atas 200 juta jiwa menimbulkan tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Penyebab krisis pangan dunia adalah pertumbuhan penduduk, dimana jumlah penduduk meningkat drastis, sehingga kebutuhan pangan juga meningkat tajam, dengan menggunakan bahan baku pangan sebagai bahan bakar, dan meningkatnya kesejahteraan penduduk, yang mengarah pada peningkatan permintaan pangan. Dari sisi konsumsi, ketiga faktor tersebut telah meningkatkan konsumsi pangan secara signifikan. Selama 25 tahun dari tahun 1990 hingga 2005, konsumsi pangan tercatat hanya 25 juta ton per tahun, namun meningkat secara signifikan dari tahun 2005 hingga 2010, melampaui konsumsi pangan selama lebih dari 25 tahun. 3 negara yang diperkirakan mengalami krisis pangan terburuk diproyeksikan melanda: China, India, dan India (Husni, 2012).

Meskipun Indonesia tidak dapat mencegah terjadinya krisis pangan global, pemerintah diharapkan dapat meletakkan dasar bagi pembangunan pertanian berkelanjutan. Perlu dilakukan evaluasi terhadap paradigma ketahanan pangan yang ada. Hal ini disebabkan fakta bahwa ketahanan pangan di negara-negara berkembang mengubah mereka dari eksportir menjadi importir dalam perdagangan internasional.

Gambar 2
Impor Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2008-2011 Triwulan I



Sumber: BPS diolah Pusdatin 2011

Ketersediaan pangan, keterjangkauan, dan distribusi merupakan komponen kunci dari gagasan ketahanan pangan. Ini juga menyoroti pentingnya asupan dan konsumsi makanan. Untuk mencapai ketahanan pangan, ketiga persyaratan yang terkait erat ini harus dipenuhi. Aspek ketersediaan tidak menunjukkan asal atau sumber makanan yang diterima. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa impor pangan meningkat terutama pada tahun 2009, 2010 dan 2011. Impor dilakukan secara besar-besaran atas nama peningkatan dan penjaminan

ketahanan pangan nasional. Impor pangan dapat dilakukan ketika situasi pangan dalam negeri sangat kritis. Ini adalah kebijakan yang tepat karena pasar dalam negeri tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan pangan. Tapi ini merugikan negara pengimpor, jika melakukan impor terus menerus.

Krisis pangan dunia mungkin dapat berakhir jika menerapkan salah satu kebijakan berupa perubahan paradigma ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan dan petani yang mengarah kepada kemandirian pangan. Kedaulatan pangan memberi negara hak penuh memutuskan kebijakan pangan suatu negara. Ketergantungan impor pangan yang meningkat akan menghambat kemandirian pangan. Kebijakan yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan produksi tanaman antara lain (1) peningkatan pasokan input dan kelancaran distribusi ke tingkat petani, sistem penanganan pasca panen, pengembangan sistem iptek, dan subsidi benih; dan (2) menerapkan kebijakan pembelian gabah (terutama beras) dan subsidi kredit untuk program pertanian.

Kebijakan impor yang berkelanjutan dan naik setiap tahun membuat Indonesia bergantung pada negara lain untuk mencukupi kebutuhan pangan. Jika terjadi krisis pangan global, Indonesia akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan pangannya karena semua negara memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangannya sendiri dan membatasi ekspor pangan. Mengimpor tanaman pangan dengan harga lebih rendah dari harga pangan dalam negeri membuat petani kecil hati yang akan menyebabkan berkurangnya produksi tanaman pangan.

Pertumbuhan penduduk yang cepat dan konversi lahan yang sangat produktif menjadi lahan perkebunan dan tanaman non-pangan menghadirkan tantangan yang perlu diperhatikan terkait kinerja sektor pertanian. Peningkatan kinerja akan berdampak pada peningkatan produktivitas (Supriyanto and Permatasari, 2022). Berkurangnya produksi pangan dari perubahan penggunaan lahan akan mengakibatkan defisit impor yang pada akhirnya akan memperburuk situasi gizi Indonesia. Salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mempersiapkan krisis pangan global adalah mengalihkan fokus dari ketahanan pangan ke kedaulatan pangan, serta memberdayakan petani untuk menghasilkan pangan yang cukup sendiri. Suatu negara memiliki kontrol penuh atas kebijakan pangannya jika memiliki kedaulatan pangan.

Impor pangan yang cenderung meningkat akan mengganggu swasembada pangan. Memproyeksikan penurunan swasembada pangan dan keberlanjutan ketahanan pangan di tingkat nasional. Langkah-langkah untuk meningkatkan produksi tanaman yang harus dipertimbangkan adalah (1) Teknologi dan subsidi benih. (2) Penerapan pedoman harga beli sereal (khususnya beras) dan subsidi kredit untuk program pertanian; Menaikkan tarif impor beras bermanfaat dari segi ketahanan pangan nasional karena dapat meningkatkan tingkat swasembada beras. Di sisi lain, berkurangnya swasembada beras

diakibatkan oleh liberalisasi perdagangan yang merugikan ketahanan pangan nasional (Saliem *et al.*, 2004).

KESIMPULAN

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, populasi saat ini tumbuh pada tingkat yang dipercepat, yang menghadirkan masalah tersendiri. Ekspansi populasi harus disalahkan atas masalah pangan global karena karena populasi telah berkembang pesat, begitu juga kebutuhan pangan. Hal ini dikarenakan penduduk yang memanfaatkan bahan baku pangan sebagai bahan bakar, yang meningkatkan permintaan pangan.

Impor dilakukan secara besar-besaran atas nama peningkatan dan penjaminan ketahanan pangan nasional. Tapi ini merugikan negara pengimpor, jika melakukan impor terus menerus. Kebijakan impor yang terus menerus dan kenaikan setiap tahun membuat Indonesia bergantung pada negara lain untuk kebutuhan pangan. Mengimpor tanaman pangan dengan harga lebih rendah dari harga pangan dalam negeri membuat petani kecil hati yang akan menyebabkan berkurangnya produksi tanaman pangan.

Kecenderungan kenaikan impor pangan akan menggerogoti kemandirian pangan. Salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mempersiapkan krisis pangan global adalah mengalihkan fokus dari ketahanan pangan ke kedaulatan pangan, serta memberdayakan petani untuk menghasilkan pangan yang cukup sendiri. Suatu negara memiliki kontrol penuh atas kebijakan pangannya jika memiliki kedaulatan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- AR Hanani, N. (2008) 'Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan, Tantangan Dan Harapan Dalam Pembangunan Pertanian Di Indonesia Serta Pembangunan Pertanian Dan Kemiskinan', in *Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional dengan Dukungan Pertanian Berkelanjutan*. Universitas Brawijaya, pp. 1-37. Available at: <http://nuhfil.lecture.ub.ac.id/files/2009/02/ketahanan-pangan-dan-pertanian-nuhfil-compatibility-mode.pdf> (Accessed: 28 April 2023).
- Badan Pusat Statistik (2022) *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa) 2020-2022*, Badan Pusat Statistik. Available at: <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> (Accessed: 26 April 2023).
- Dewi, P.G. and Ginting, M.A. (2012) 'Antisipasi Krisis Pangan Melalui Kebijakan Diversifikasi Pangan', *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 3(1), pp. 65-78.
- Global Food Security Index (2022) *Indonesia Country Report, Global Food Security Index*. Available at:

<https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/explore-countries/indonesia> (Accessed: 26 April 2023).

Hs Mudrieq, S. (2014) 'Problematika Krisis Pangan Dunia dan Dampaknya Bagi Indonesia', *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, 06(02), pp. 1287–1302.

Husni, A. (2012) *Ancaman Krisis Pangan dan Komunitas ASEAN*. Available at: <https://ahmdhusni.wordpress.com/2012/02/18/ancaman-krisispangan-dan-komitmen-asean/> (Accessed: 18 March 2023).

Paipan, S. and Abrar, M. (2020) 'Determinan Ketergantungan Impor Beras di Indonesia (Determinants of Rice Import Dependency in Indonesia)', *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(01), pp. 53–64.

Partiwi, A.A. and Sukamdi (2016) 'Pengaruh Dinamika Penduduk Terhadap Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur', *Jurnal Bumi Indonesia*, 05(04), pp. 1–9.

Saliem, H.P. et al. (2004) *Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Kinerja Ketahanan Pangan Nasional*, Bogor: Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. Available at: <http://www.pse.litbang.deptan.go.id> (Accessed: 14 April 2023).

Supriyanto, A. (2022) 'Komitmen Organisasi: Ditinjau dari Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Transaksional Yang Dimoderasi Leader-Member Exchange', 11(April).

Supriyanto, A. and Hana, K. F. (2020) 'Strategi Pengembangan Desa Digital untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM', 8(2), pp. 199–216.

Supriyanto, A. and Permatasari, R. D. (2022) 'Kesuksesan Muslimah Pelaku UMKM: Peran Dimensi Entrepreneurial Orientation', 10, pp. 267–286.